

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTREM DI
KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH**

Christine Mekarwati Motte

NPP. 31.1024

Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 31.1024@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hendrawati Hamid, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problems include ineffective data collection on families receiving direct cash assistance for extreme poverty, delays in disbursement of direct cash assistance for extreme poverty, and lack of knowledge in village communities about direct cash assistance for extreme poverty. One of the reasons is because there is still a lack of active participation from the community in the programs provided and this is the impact of policies and social structures in society, thus forming dependency and wrong attitudes and thought patterns. **Purpose:** This study aims provide an overview of the empowerment of poor communities through the Extreme Poverty Direct Cash Assistance Program (BLT) in Nabire Regency, the inhibiting factors and the efforts made in Nabire Regency. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods and analysis of community empowerment according to Aswas Theory. Data collection techniques are interviews (9 informants), and observation. Data collection techniques were carried out using questionnaires (50 respondents), in-depth interviews (7 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research are the empowerment of poor communities through the Extreme Poverty Direct Cash Assistance Program (BLT) seen in 4 (four) dimensions, namely based on needs, problems and potential, the main targets are the community, social and economic aspects and participatory decisions, it was found that empowering poor communities through BLT for Extreme Poverty has gone quite well but is not yet optimal. **Conclusion:** It can be seen that community empowerment has not been carried out actively, comprehensively and sustainably. The emphasis in this concept is on empowering poor people not only by receiving assistance without developing themselves but also by increasing self-awareness to get out of poverty.*

Keywords: *Empowerment, Poor Communities, BLT Extreme Poverty*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan antara lain pendataan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem yang belum efektif, terhambatnya pencairan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem, dan kurangnya pengetahuan masyarakat kampung tentang bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem. Salah satu penyebabnya dikarenakan masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam program yang diberikan dan merupakan dampak dari kebijakan dan struktur sosial masyarakat sehingga membentuk ketergantungan serta sikap dan pola pikir keliru. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk emberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLT) di Kabupaten Nabire, penghambat serta upaya yang dilakukan di Kabupaten Nabire. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap pemberdayaan masyarakat menurut Teori Aswas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara (9 informan), dan observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket (50 responden), wawancara mendalam (7 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLT) dilihat pada 4 (empat) dimensi yakni Berdasarkan kebutuhan, masalah, dan potensi, sasaran utama adalah masyarakat, aspek sosial dan ekonomi dan keputusan secara partisipatif, diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui BLT Kemiskinan Ekstrem sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. **Kesimpulan:** Hal tersebut dapat dilihat pemberdayaan masyarakat dilakukan belum secara aktif, menyeluruh dan berkelanjutan. Penekanan pada konsep ini ialah dalam pemberdayaan masyarakat miskin bukan hanya bukan hanya sekedar menerima bantuan dengan tanpa mengembangkan diri tetapi dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk keluar dari kemiskinan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, BLT Kemiskinan Ekstrem

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kesulitan pekerjaan yang menghalangi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kemiskinan dalam berbagai bentuknya, berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat (Anjela, 2019).

Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 25,67 juta jiwa. Pada tahun 2014 sebesar 24,78 juta jiwa. Pada tahun 2020 sebesar 27,55 juta jiwa. Pada tahun 2021 sebesar 26,50 juta jiwa Pada tahun 2022 sebesar 26,36 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi di salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Nabire.

Kabupaten Nabire mengalami peningkatan angka kemiskinan yang terus meningkat pada angka 37.060 jiwa pada tahun 2018, 37.140 jiwa pada tahun 2019, dan 37.822 jiwa pada tahun 2020 (BPS Kab. Nabire, 2020). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dengan cara pencairan dan penyaluran dana dimana setiap keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem mendapat bantuan sebesar Rp. 300.000 per bulan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kabupaten Nabire mencairkan dan menyalurkan bantuan tunai langsung kemiskinan ekstrem yang bersumber dari dana desa ke 9 (sembilan) kampung dari 72 kampung. Pencairan dan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dimulai dari bulan agustus tahun 2023. Dimana jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem sebanyak 78 keluarga. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan dana yang diberikan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat membantu perekonomian masyarakat (Syamsuddin, S, 2022). Kabupaten Nabire mencairkan dan menyalurkan bantuan tunai langsung kemiskinan ekstrem yang bersumber dari dana desa ke 9 (sembilan) kampung dari 72 kampung. Pencairan dan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dimulai dari bulan agustus tahun 2023. Dimana jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem sebanyak 78 keluarga. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan dana yang diberikan dapat digunakan oleh

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat membantu perekonomian masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nabire. Pendataan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dinilai belum efektif yang dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, data keluarga penerima manfaat yang cenderung tidak diperbaharui sehingga perangkat desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT/RW maupun data yang sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data yang valid. Kedua, berkaitan dengan pendataan di tingkat kampung yang mencakup pendataan keluarga miskin ekstrem baru, yang tidak efektif karena kesalahan dalam memahami kriteria bantuan. Ketiga, tidak ada transparansi dalam hasil pendataan dimana banyak masyarakat yang mengeluh bahwa mereka tidak terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem, meskipun mereka berhak menerima bantuan tersebut.

Terhambatnya pencairan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di 63 kampung. Bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem seharusnya dicairkan dan disalurkan kepada 72 kampung yang berada di Kabupaten Nabire akan tetapi, baru 9 (sembilan) kampung yang mencairkan dan menyalurkan bantuan tersebut sedangkan 63 kampung lainnya belum. Hal ini dikarenakan banyaknya dokumen yang belum dilengkapi oleh 63 kampung tersebut. Sehingga pencairan dan penyalurannya hanya dilakukan oleh kampung yang sudah melengkapi dokumen tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat kampung tentang bantuan tunai langsung kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah kampung untuk membantu masyarakat dengan memberikan informasi tentang tujuan, maksud, mekanisme, kriteria, dan jumlah yang diterima oleh keluarga penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara formal melalui pertemuan atau poster yang dipasang di mading kampung.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin maupun konteks bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian Heru Purnawan & Subhan Ilham Thareq berjudul *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang* (Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I, 2022) bahwa BLT-DD diterima secara positif oleh masyarakat akan tetapi masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum tepat sasaran, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, kurangnya pemahaman terkait BLT-DD. Penelitian Yumna menemukan bahwa masyarakat yang cenderung bergantung dengan bantuan yang diberikan setiap bulannya dengan jumlah nominal yang cukup sehingga pemberdayaan yang dilakukan harus mampu memperhatikan keputusan dan suara dari masyarakat. (Yumna, 2021). Penelitian Angkotasan menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Masih terdapat beberapa penghambat internal dari masyarakat, ketersediaan pendamping, serta perbedaan kondisi geografi. (Angkotasan, 2022). Penelitian Lili, M. A. menemukan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai dilihat dari sisi positif dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta meringgankan beban masyarakat walaupun dengan nominal yang kecil. Namun dari sisi negatifnya menyebabkan munculnya sifat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tersebut serta sifat konsumtif. (Lili, M. A, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Nur, U. A., & Rahaju, T penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Mojorutu sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, namun yang menjadi permasalahan adalah munculnya sikap cemburu antar masyarakat dikarenakan aparat yang dianggap pilih kasih pada masyarakat penerima manfaat. (Nur, U. A., & Rahaju, T, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknis analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Aswas (Aswas, 2014) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat terjadi pada empat tahap, yaitu berdasarkan kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki; masyarakat sebagai sasaran utama; aspek kehidupan masyarakat; pengambilan keputusan secara partisipatif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dan juga penghambat serta upaya yang dilakukan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis data melalui tahap integrasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Kabupaten Nabire, Keluarga Penerima Manfaat BLT Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Nabire yang tepat pencairan (yang terhambat pencairan (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang)., Keluarga Penerima Manfaat BLT Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Nabire yang terhambat pencairan (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang. Keluarga Penerima Manfaat BLT Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Nabire yang terhambat pencairan (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori pemberdayaan yang digagas oleh Aswas (2014) yang menyatakan bahwa prinsip pemberdayaan ada 11 akan tetapi penulis hanya menganalisis menggunakan 4 prinsip pemberdayaan, yaitu berdasarkan dimensi, kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki; sasaran utama ialah masyarakat; aspek sosial dan ekonomi; keputusan secara partisipatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nabire menggunakan pendapat dari Aswas yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat terjadi pada empat tahap, yaitu berdasarkan dimensi, kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki; sasaran utama ialah masyarakat; aspek sosial dan ekonomi; keputusan secara partisipatif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada

subbab berikut.

3.1. Berdasarkan dimensi, kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki

Penulis melakukan analisis terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan. Dimensi berdasarkan kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki merujuk pada pemahaman bahwa masyarakat sasaran bantuan atau program BLT Kemiskinan Ekstrem dilibatkan secara aktif dan menyeluruh sehingga kemandirian masyarakat tumbuh dan berkembang. Indikator merupakan variabel yang dapat menunjukkan tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Terdapat 2 (dua) indikator dalam dimensi ini diantaranya adalah mengatasi masalah kemiskinan dengan melihat kebutuhan yang dimiliki masyarakat serta kesetaraan.

1. Mengatasi masalah kemiskinan dengan melihat kebutuhan yang dimiliki masyarakat.

Indikator pemanfaatan bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Ibu Ruth pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bahwa:

“BLT yang diterima setiap bulan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, perlengkapan sekolah anak-anak dan juga tambahan membeli bahan baku kerajinan yang nantinya akan dijual kembali seperti benang yang akan diolah menjadi noken sehingga dapat dijual dan menjadi penghasilan tambahan.” Seperti yang disampaikan informan Ibu Sherly pada tanggal 10 Januari 2024 menyebutkan bahwa “Ya benar uang BLT kami gunakan untuk keperluan anak sekolah seperti beli buku, seragam dan kebutuhan sekolah lainnya, selain itu buat beli beras, minyak goreng dan sembako lainnya”. Dapat dipahami KPM telah menggunakan bantuan sesuai dengan tujuannya, selaras dengan itu informan Ibu Jois pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “BLT yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar biaya sekolah”. Dari ketiga pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa KPM menggunakan bantuan untuk konsumsi rumah tangga yaitu kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah sehingga dapat meningkatkan konsumsi keluarga dan menunjang Pendidikan. Namun masih ditemukan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dibuat seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Nabire pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyatakan bahwa “Penggunaan BLT seharusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lain terkait tujuan bantuan tersebut yaitu mengatasi masalah kemiskinan ekstrem akan tetapi saya sering menemukan setelah mengambil BLT bukannya langsung membeli kebutuhan akan tetapi pergi ke tempat jual minuman keras atau ke tempat bermain judi”. Ditambah dengan pernyataan dari salah satu Pendamping Kabupaten Nabire, Ibu Adriani Nipi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa “Banyak dari masyarakat menggunakan BLT untuk membeli rokok atau minuman beralkohol kalau yang pegang uang tersebut adalah suaminya”. Terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui program BLT kemiskinan ekstrem berdasarkan hasil wawancara diatas didukung dengan hasil observasi penulis selama menjalani penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan beberapa kediaman warga. Bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem digunakan untuk biaya sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada juga yang menyalahgunakan untuk

membeli minuman beralkohol dan rokok.

2. Kesetaraan

Peningkatan konsumsi rumah tangga KPM menjadi salah satu tujuan dari BLT Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan biasa didefinisikan sebagai masyarakat dengan konsumsi dibawah garis kemiskinan dan ketika program ini mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga keluarga miskin maka dapat dikatakan tujuan BLT tercapai dimana konsumsi KPM sama dengan konsumsi non KPM (Karsidi, R, 2001). Indikator ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan masyarakat pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bahwa ketiga KPM yang diwawancarai mempergunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan program ini dinilai sangat membantu KPM dalam meningkatkan konsumsi keluarga. Salah satu hasil wawancara dengan KPM Ibu Sherly pada tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa “Tentu sangat membantu sekali kaka, dengan bantuan BLT ini yang jumlahnya Rp 300.000/bulan lumayan ya kaka bisa digunakan untuk beli sembako seperti beras, minyak goreng, telur dan bayar uang sekolah tiap bulan jadi uang yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya”. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Ruth pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “BLT buat kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur dan minyak goreng. Dengan adanya BLT tidak usah pusing darimana uang untuk membeli beras”. Dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bantuan dinilai sangat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat meningkatkan konsumsi keluarga. Namun dapat dilihat disini ada kecenderungan ketergantungan kepada bantuan yang diberikan, KPM terkesan mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pernyataan dari Ibu Sherly pada tanggal 10 Januari 2024 seperti “Saya tunggu kenapa BLT periode ini belum cair” dan juga Ibu Jois pada tanggal 10 Januari 2024 “Tapi kenapa sekarang BLT belum cair”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa KPM mampu meningkatkan konsumsi keluarga telah terpenuhi dan mendukung penelitian sebelumnya namun belum optimal karena malah menimbulkan dampak lain yaitu ketergantungan masyarakat akan bantuan tersebut. Ketergantungan membuat keterlibatan masyarakat dalam suatu program tidak dapat maksimal sehingga hanya mengikuti arus serta menjemput bola, menunggu bantuan pemerintah tanpa memikirkan cara untuk berkembang dan berusaha keluar dari jurang kemiskinan, hal ini jika tidak ditindaklanjuti maka dikhawatirkan akan mengubah esensi program penanggulangan kemiskinan dan menguatkan budaya kemiskinan. Hal ini termasuk salah satu penanggulangan kemiskinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang ditujukan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

3.2. Sasaran utama adalah masyarakat

Penulis melakukan analisis sasaran utama adalah masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan.

Dimensi sasaran utama adalah masyarakat merujuk pada pemahaman bahwa masyarakat sasaran bantuan atau program BLT Kemiskinan Ekstrem dilibatkan secara aktif dan menyeluruh sehingga kemandirian masyarakat tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan gagasan Suharto (2010), yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat

merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Dengan harapan program BLT Kemiskinan Ekstrem dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Terdapat 1 (satu) indikator dalam dimensi ini adalah mengatasi masalah kemiskinan dengan melihat kesadaran masyarakat.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri. Mandiri disini maksudnya adalah kemandirian dalam berpikir lalu bertindak dan mampu mengendalikan apa yang dilakukan yaitu masyarakat mampu mengelola dana BLT (Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T, 2023). Kemiskinan Ekstrem Seperti yang disampaikan informan Ibu Adriani Nipi pada tanggal 11 Januari 2024 menegaskan bahwa “Masyarakat diberdayakan agar sadar dengan apa yang mereka alami, tidak hanya untuk individu dari tiap masyarakat tapi masyarakat diberdayakan agar terbentuk masyarakat yang aktif dan tidak acuh lagi dengan kondisi sekitarnya. Sehingga kedepannya masyarakat menjadi mandiri dan tidak bergantung dari bantuan yang diberikan”. Berdasarkan hasil wawancara diatas didukung dengan hasil observasi penulis selama menjalani penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire telah melakukan salah satu upaya dalam kegiatan pemberdayaan yaitu dengan merubah masyarakat menjadi mandiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri, dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi berpangku tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan utama. Masyarakat akan terbiasa untuk bergerak inisiatif ketika terjadi permasalahan di lingkungannya. Pemerintah juga menjadi tidak terlalu terbebani lagi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3.3. Aspek Sosial dan Ekonomi

Penulis melakukan analisis aspek sosial dan ekonomi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan.

Dimensi aspek sosial dan ekonomi merujuk pada pemahaman bahwa aktor dalam BLT memiliki daya tak terkecuali masyarakat sasaran program BLT atau KPM yang menjadi fokus utama pengentasan kemiskinan. KPM BLT Kemiskinan Ekstrem ditempatkan sebagai subjek dunianya sendiri untuk mengembangkan kemampuan melalui keterlibatan berbagai pihak melalui keterlibatan yang aktif, adil dan seimbang. Dalam dimensi ini terdiri 2 (dua) indikator yaitu memperkuat kelembagaan masyarakat serta terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat.

1. Memperkuat kelembagaan masyarakat

Memperkuat dan mengendalikan kelembagaan masyarakat dapat mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Melalui wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire, Bapak Pilemon Madai, S. Th pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyebutkan bahwa “tujuan utama BLT Kemiskinan Ekstrem ini adalah pengentasan kemiskinan dimana dengan adanya bantuan ini masyarakat mampu untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Misalnya dengan membuat usaha kerajinan noken atau kerajinan hiasan kepala yang nantinya dapat menghasilkan uang”. Berkaitan dengan hal ini penulis

juga melaksanakan wawancara bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Nabire, Bapak Alfredo Tiwery, S.STP pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengungkapkan bahwa “BLT Kemiskinan Ekstrem memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mempersiapkan dan penguatan aset dan potensi masyarakat miskin agar mampu berpartisipasi dalam mengendalikan dan memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian”. Berdasarkan hasil wawancara di atas didukung dengan hasil observasi penulis selama menjalani penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire telah melakukan salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat dengan pemberdayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa BLT Kemiskinan Ekstrem bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

2. Terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat.

Terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian KPM menjadi salah satu tujuan BLT kemiskinan ekstrem. Dengan perubahan perilaku masyarakat diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Kemudahan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang dinilai mampu memecahkan jurang kesenjangan (Ras, A. A., 2013). Terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian KPM dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pendamping Kabupaten Nabire, Ibu Adriani Nipi pada tanggal 11 Januari 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa “Sejauh ini yg paling bisa diukur perubahan perilakunya melalui komponen sekolah. Dimana kita memantau anak-anak yang mendapat catatan khusus dari sekolahnya itu ada perubahan atau tidak”. Berdasarkan hasil wawancara di atas didukung dengan hasil observasi penulis selama menjalani penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Penulis mengamati bahwa belum adanya pengukuran terhadap indikator dinilai masih sulit tetapi untuk komponen pendidikan atau perilaku lebih terukur.

Dari analisis kedua indikator di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi pemberdayaan telah terpenuhi tapi belum optimal pada indikator terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan komponen BLT kemiskinan ekstrem dikarenakan kecenderungan menimbulkan dampak lain berupa ketergantungan KPM kepada bantuan yang diberikan.

3.4. Keputusan Secara Partisipatif

Penulis melakukan analisis keputusan secara partisipatif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan.

Dimensi keputusan secara partisipatif merujuk pada pemahaman bahwa aktor dalam BLT memiliki peran sangat penting. Aktor yang dimaksud ialah masyarakat miskin sasaran program BLT atau KPM yang menjadi fokus utama pengentasan kemiskinan. KPM ikut serta dalam pengambilan keputusan yang direncanakan bersama pendamping dan KPM diharapkan dapat memertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab.

Partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pengentasan kemiskinan adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinisiatif, kreatif, dan menggali berbagai potensi sumber daya yang mereka miliki demi pencapaian tujuan-tujuan proyek dalam memenuhi sendiri kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire, Bapak Pilemon Madai, S.Th pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyebutkan bahwa “keterlibatan masyarakat menjadi hal penting dalam program pemberdayaan ini seperti ikut dalam merencanakan dan membuat pertanggung jawaban. Masyarakat menjadi tujuan sekaligus subjek dalam program BLT kemiskinan ekstrem ini. Sehingga masyarakat peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting seperti pengambilan keputusan dalam menggunakan dana BLT Kemiskinan Ekstrem ini karena masyarakatlah yang mengetahui kondisi mereka dan apa yang mereka dibutuhkan”. Berkaitan dengan hal di atas, penulis melaksanakan wawancara dengan pendamping Kabupaten Nabire, Ibu Adriani Nipi pada tanggal 11 Januari 2024 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui BLT Kemiskinan Ekstrem sangat diperlukan. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang disetujui bersama dan masyarakat menggunakan BLT Ekstrem dan mempertanggung jawabkannya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan karena masyarakat ikut dalam memutuskan dan menjamin bahwa kegiatan sesuai dengan realita sosial yang terjadi. Namun, terkait dengan operasionalnya pertanggung jawabannya masyarakat kurang peduli dan sepenuhnya sehingga menjadi beban dan tanggung jawab pendamping. Hal ini karena masyarakat belum begitu memahami terkait BLT Kemiskinan Ekstrem sehingga kurang memiliki kepedulian.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem ini memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat miskin di Kabupaten Nabire. Bantuan Langsung Kemiskinan Ekstrem adalah salah satu bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan penggunaan anggaran BLT, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Angkotasan bahwa masyarakat berperan aktif untuk memahami potensi dan masalah yang dihadapi, melakukan jejaring dan mengadvokasi diri mereka sendiri (Angkotasan,2022).

Penulis menemukan KPM dapat meningkatkan konsumsi keluarga namun belum optimal karena malah menimbulkan dampak lain yaitu ketergantungan masyarakat akan bantuan tersebut. Ketergantungan membuat keterlibatan masyarakat dalam suatu program tidak dapat maksimal. Namun berdasarkan analisis penulis, dimensi ini belum mencapai optimal karena menimbulkan dampak lain yaitu ketergantungan. Sama halnya

dengan penelitian Heru Purnawan & Subhan bahwa BLT-DD diterima secara positif oleh masyarakat akan tetapi masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum tepat sasaran, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, kurangnya pemahaman terkait BLT-DD (Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022).

Penulis menemukan pemberdayaan telah terpenuhi tapi belum optimal pada indikator terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian kpm dalam mengakses layanan komponen blt kemiskinan ekstrem dikarenakan kecenderungan menimbulkan dampak lain berupa ketergantungan kpm kepada bantuan yang diberikan. Sama halnya dengan penelitian Lili, M. A meringgankan beban masyarakat walaupun dengan nominal yang kecil.namun dalam dari sisi negatifnya menyebabkan munculnya sifat ketergantuan masyarakat terhadap bantuan tersebut serta sifat konsumtif (Lili, M. A, 2018).

Penulis menemukan partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan karena masyarakat ikut dalam memutuskan dan menjamin bahwa kegiatan sesuai dengan realita sosial yang terjadi. Namun berdasarkan analisis penulis, dimensi ini belum mencapai optimal karena dalam operasionalnya pertanggung jawabannya masyarakat kurang peduli dan sepenuhnya sehingga menjadi beban dan tanggung jawab pendamping. Sama halnya dengan penelitian Nur, U. A., & Rahaju, T bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Mojorutu sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, namun yang menjadi permasalahan adalah munculnya sikap cemburu antar masyarkat dikarenakan aparat yang dianggap pilih kasih pada masyarakat penerima manfaat. (Nur, U. A., & Rahaju, T, 2020).

Penulis menemukan terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri, dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi berpangku tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan utama. Sama halnya dengan penelitian Yumna menemukan bahwa masyarakat yang cenderung bergantung dengan bantuan yang diberikan setiap bulannya dengan jumlah nominal yang cukup sehingga pemberdayaan yang dilakukan harus mampu memperhatikan keputusan dan suara dari masyarakat (Yumna, 2021).

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem Kabupaten Nabire ini yakni kpm kurang tertib administrasi kependudukan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait blt, belum menciptakan kemandirian akan tetapi menimbulkan dampak ketergantungan, budaya dan mentalitas yang buruk, kpm belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembentukan DTKS.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem Kabupaten Nabire ini telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal dikarenakan kpm kurang tertib administrasi kependudukan, kurangnya pengetahuan

masyarakat terkait blt, belum menciptakan kemandirian akan tetapi menimbulkan dampak ketergantungan, budaya dan mentalitas yang buruk, kpm belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembentukan DTKS. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi kembali terkait pentingnya tertib administrasi khususnya bagi keluarga miskin di Kabupaten Nabire, pendamping memberikan pemahaman secara intensif terkait urgensi dan nilai manfaat dari kegiatan blt kemiskinan ekstrem, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan bukan penyelesaian permasalahan dan bersifat sementara, pendataan kembali melalui survei langsung, memperbaiki sistem pendataan sehingga tepat sasaran, memperbaiki sistem pengawasan dari pendamping ke masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/20725/>
- Aswas, O. M. (2014). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Statistik Indonesia 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kab. Nabire, (2020). *Kabupaten Nabire Dalam Angka 2020*. BPS Kab Nabire.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28748>
- Karsidi, R. (2001). Paradigma baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 115-125. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/711>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Penyaluran BLT Desa dibandingkan dengan angka kemiskinan 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyalaran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage. <https://www.jblearning.com/catalog/productdetails/9781284262391>
- Nur, U. A., & Rahaju, T. (2020). Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Percepatan Pembangunan Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Publika*, 8(5).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36900>

Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407-416.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5700>

Ras, A. A. (2013). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 56-63. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/555>

Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T. (2023). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 87-99.
<https://rayyanjournal.com/index.php/jetish/article/view/59>

Suharto (2010). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158-190.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77>

Syamsuddin, S. (2022). Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 22-3 <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/1404>

Yumna, Y. (2021). Sinergisitas Desa dalam Optimalisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-dd) di Desa Batujajar Barat. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(2), 39-56.
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/195>

